

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PTA  
MAKASSAR NOMOR: 85/PDT.G/2015/PTA.MKS YANG  
MEMBATALKAN PUTUSAN PA SENGKANG NOMOR:  
51/PDT.G/2015/PA.SKG TENTANG PENERAPAN *DWANGSOM*  
DALAM PERKARA HADANAH**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Khosnol Khotimah  
NIM. C91217115**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khosnol Khotimah  
NIM : C91217115  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTA Makassar  
Nomor: 85/Pdt.G/PTA.Mks. yang Membatalkan  
Putusan PA Sengkang Nomor:  
51/Pdt.G/2015/PA.Skg Tentang Penerapan  
*Dwangsom* dalam Perkara Hadanah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya seni sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Khosnol Khotimah  
C91217115

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Khosnol Khotimah NIM. C91217115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing



**Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag**  
**NIP.196006201989032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khosnol Khotimah Nim. C91217115 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Dra. Siti Daliliah Candrawati M.Ag  
NIP. 196006201989032001

Penguji II,

Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag  
NIP. 197908012011012003

Penguji III,

A. Kemal Riza, S. Ag, MA  
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, M.H  
NIP. 19111102019031017

Surabaya, 13 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan M.Ag  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend.A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-841300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Khosnol Khotimah  
NIM : C91217115  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam  
E-mail adress : [imasoree@yahoo.com](mailto:imasoree@yahoo.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang Membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang Penerapan *Dwangsom* dalam Perkara Hadanah**

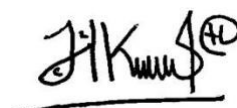
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabayam segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2021

Penulis



(Khosnol Khotimah)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang Membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang Penerapan *Dwangsom* dalam Perkara Hadanah” merupakan penelitian pustaka untuk menjawab dua permasalahan: pertama tentang pertimbangan hukum Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah dan kedua analisis yuridis Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu menitikberatkan pada bahan tertulis sebagai sumber utamanya yaitu Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah sebagai upaya agar putusan tidak menjadi *illusoir* (hampa) agar Tergugat mau menjalankan isi putusan secara sukarela dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan anak. Namun, *dwangsom* bersifat imperatif (bukan sebuah keharusan) untuk dikabulkan hal ini kembali kepada objektivitas hakim untuk menilai suatu putusan. Kedua analisis yuridis pertimbangan hukum mengabulkan permohonan *dwangsom* sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding dalam perkara hadanah di PTA Makassar telah memenuhi landasan filosofis dan landasan yuridis yaitu ketentuan *Reglement* Acara perdata (*Reglement op de bugerlijke Rechvordering*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, SEMA No. 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama yang pada pokoknya membahas bahwa *dwangsom* hadir sebagai upaya untuk meminimalisir kesulitan dalam pengeksekusian anak, penjatuhan *dwangsom* harus didasarkan atas permohonan yang jelas dan bersifat *condemnatoir*, serta hakim dilarang melakukan *ultra petita* dalam menjatuhkan *dwangsom* demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu pertama bagi advokat dan Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi orang yang berperkara untuk meminta Penggugat mencantumkan permohonan *dwangsom* dalam petitum gugatan. Kedua, mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Hukum Acara Perdata Tahun 2007 yang di dalamnya memuat salah satunya mengenai penerapan *dwangsom*.

## DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PENERAPAN <i>DWANGSOM</i> DI LINGKUNGAN PERADILAN DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA.....	20
A. Penerapan <i>Dwangsom</i> di Lingkungan Peradilan.....	20
1. Pengertian <i>Dwangsom</i> .....	20
2. Landasan Yuridis Ketentuan <i>Dwangsom</i> .....	24
3. Tata Cara Permohonan <i>Dwangsom</i> .....	34
4. Putusan Pengadilan yang Dapat Dijatuhi <i>Dwangsom</i> .....	38
B. Konsep Perlindungan Anak di Indonesia.....	40
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	40
2. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif.....	42
3. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.....	46





# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hadanah berasal dari kata *al-h{id}nu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syarak hadanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.<sup>1</sup> Hadanah pada dasarnya merupakan bentuk usaha memelihara seseorang yang tidak mampu untuk mengurus keperluannya sendiri. Salah satu penyebabnya karena orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang belum mumayiz seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila.

Hadanah bersifat kekuasaan dan kepemilikan yang mana hukumnya adalah wajib bagi tiap-tiap orang yang dibebankan hadanah. Menurut ulama yang ahli dalam bidang hadanah, hak mengurus hadanah itu terletak pada tiga hak. *Pertama*, hak yang memelihara. *Kedua*, hak yang dipelihara. *Ketiga*, hak ayah selaku wakil dari anak tersebut. Namun apabila ketiganya mampu maka hadanah menjadi tanggung jawab bersama.<sup>2</sup>

Terdapat dua unsur dalam pengasuhan anak, yaitu orang tua yang disebut *had{in* dan anak yang disebut *mahd{un*.<sup>3</sup> Kedua orang tua berkewajiban untuk bekerjasama merawat anak tersebut. Namun, ketika terjadi putusnya perkawinan, kewajiban mengasuh anak tidak serta-merta

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu juz 10* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 59

<sup>2</sup> Ibid., 60

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: KENCANA, 2014), 328

Upaya yang dilakukan selama ini hanya terbatas pada upaya eksekusi anak, yang mana hal ini bukanlah solusi yang tepat. Eksekusi terhadap perkara hadanah masih seringkali dijumpai perselisihan. Pakar hukum yang memperbolehkan eksekusi anak berpendapat bahwa selama sifat putusan tersebut adalah *condemnatoir* dan berkekuatan hukum tetap maka eksekusi anak dapat dilakukan. Sedangkan pakar hukum yang menolak eksekusi anak berpendapat bahwa pengeksekusian yang selama ini berlaku hanya terhadap perkara yang bersifat kebendaan, anak yang objeknya manusia tidak dapat dieksekusi. Tingkat keberhasilan eksekusi anak masih tergolong rendah hal ini karena terdapat beberapa permasalahan dikarenakan objek perkaranya adalah orang.

[illegible]

*Dwangsom* (uang paksa) adalah salah satu hukuman tambahan selain hukuman pokok. Di mana hukuman tersebut berupa pembayaran sejumlah uang ketika pihak yang kalah dalam persidangan terlambat menjalankan hukuman pokok.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah* (Jakarta: Kencana, 2018), 1

sebuah tindakan untuk menekan *psychis* pihak yang bersangkutan agar ia melakukan prestasi secara sukarela.<sup>5</sup>

Untuk menghindari ketidakpastian penegakan hukum, maka campur tangan pengadilan menjadi penting sebagai upaya agar dapat dijumpai putusan yang dapat dilakukan secara suka rela.<sup>6</sup> Hal ini juga mendorong hakim melakukan langkah progresif bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Mengingat *dwangsom* penting dalam perkara hadanah, usaha-usaha telah dilakukan oleh beberapa ahli hukum untuk merumuskan landasan yang dapat digunakan bagi hakim untuk memuat amar putusan yang menjatuhkan *dwangsom* khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana hasil diskusi bidang Peradilan Agama yang mana menjelaskan mengenai: “Pada dasarnya putusan perkara hadanah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom*”.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa alasan penting penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah. *Pertama*, sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan eksekusi anak yang selama ini terkendala dengan masalah teknis. *Kedua*, sebagai upaya memberikan tekanan *psychis* agar Tergugat mau untuk melaksanakan

<sup>5</sup> Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom)* (Jakarta: Kencana, 2020), 19

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2016), 153

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, *Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (komisi II)* (Rakernas MA RI di Manado tanggal 31 Oktober 2012), 2

Hakim yang menjatuhkan *dwangsom* berpendapat bahwa *dwangsom* sebagai upaya agar tergugat menjalankan isi putusan secara sukarela sehingga putusan yang telah dijatuhkan hakim tidak menjadi *illusoir* (hampa).

Namun beberapa pendapat hakim terkait dengan penolakan putusan untuk menerapkan *dwangsom* yakni:<sup>8</sup>

- a. Dalam beberapa putusan yang menolak *dwangsom* beberapa hakim masih berpendapat bahwa dengan bunyi amar putusan yang bersifat *comdemnatoir* (menghukum) tidak perlu ditambahkan *dwangsom*.
- b. Di samping itu ada juga hakim yang berpendapat bahwa *dwangsom* tidak termasuk dalam acara Peradilan Agama sehingga atas dasar itu setiap permohonan *dwangsom* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

[illegible]

Hakim seyogianya sebagai corong Undang-Undang harus senantiasa menciptakan hukum yang adil dan dapat diterapkan di masyarakat. Keberadaan *dwangsom* juga harus dimaknai sebagai jawaban dari setiap permasalahan sulitnya pengeksekusian anak. sehingga penting pemahaman disini sebagai langkah pemenuhan keadilan dan kemanfaatan hukum yang baik.

[illegible]

## 1. Identifikasi Masalah

- a. Pengertian tentang hadanah.
- b. Dasar hukum penerapan hadanah.
- c. Perkara pengeksekusian anak.
- d. Kesulitan dalam pengeksekusian anak.
- e. Landasan yuridis penerapan *dwangsom* di Pengadilan Agama.
- f. Landasan yuridis tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah.
- g. Dasar Pertimbangan hakim pada Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah.

Dari identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan dianalisis yaitu:

- [illegible]

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum terhadap Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah?

Penelitian tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah di lingkungan Peradilan Agama pada Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor:



- <sup>9</sup> Liulin Nuha, “*Dwangsom Perkara Hadanah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.PAS)*” (Skripsi -- IAIN, Ponorogo, 2019)

- a. Dasar hukum implementasi *dwangsom* dalam Peradilan Agama mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang.”
- b. Telah memenuhi unsur-unsur diperbolehkannya pengajuan *dwangsom* salah satunya *dwangsom* diminta secara tegas oleh pihak yang berperkara.

<sup>10</sup> Muhammad Akbar Alfathtaa, *“Penerapan Uang Paksa dalam Perkara Hadanah (Analisis Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.MKS)”* (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

[illegible]

- a. Proses seni lapangan yaitu pendekatan pengeksekusian terhadap anak agar tidak mengganggu psikologis anak. Meliputi seni komunikasi, kajian psikologi, dicari kan saksi pegawai perempuan yang memiliki sifat keibuan untuk membantu berkomunikasi dengan si anak.
- b. Kendala utama adalah pengeksekusian anak yang mana objek eksekusi anak namun menggunakan eksekusi barang.

Akan tetapi skripsi yang penulis angkat adalah berfokus kepada penerapan *dwangsom* sebagai upaya agar putusan tidak menjadi *illusoir* (hampa) sehingga Tergugat secara sukarela menyerahkan hadanah kepada Penggugat. Dalam hal ini tidak perlu eksekusi ketika *dwangsom* telah dijalankan sebagaimana mestinya. *Dwangsom* digunakan sebagai upaya tidak langsung agar putusan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, dalam penelitian ini melakukan kajian khusus kepada putusan yaitu Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan kemudian dianalisis berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 dan SEMA No. 3 Tahun 2018.

Hasil akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Terdapat beberapa harapan dalam penelitian ini sehingga dapat memiliki kebermanfaatan. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritis, yakni:

- Definisi operasional menjadi bagian yang penting dalam sebuah penelitian sebagai upaya untuk mencegah kesalahpahaman dalam memaknai

1. Yuridis adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *dwangsom* yakni SEMA No. 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama.
2. Putusan adalah Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang amar putusan membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah.
3. *Dwangsom* adalah salah satu dari petitum yang dikabulkan melalui amar putusan yaitu kewajiban bagi Tergugat untuk membayar sejumlah uang setiap hari keterlambatan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat melalaikan kewajiban yang dicantumkan dalam amar putusan.<sup>12</sup>
4. Hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil.<sup>13</sup> Hadanah dalam pengertian ini merupakan tuntutan pokok dalam hal putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini pengasuhan seorang anak berumur 2 tahun yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 224



- b. Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt/G/2015/PTA.Mks.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dalam hal ini menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.<sup>14</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan Putusan PTA Nomor: 85/Pdt/G/2015/PTA.Mks.

## 5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah salah satu cara yang digunakan untuk meneliti kembali terhadap catatan-catatan yang diperoleh sebelumnya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tertulis yaitu salinan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt/G/2015/PTA.Mks.

## b. Organizing

Organizing yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan memaparkan terkait dengan argumentasi gugatan, pertimbangan hukum dan amar putusan pada Putusan PA Sengkang

<sup>14</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 27

<sup>15</sup> Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif dan Kuantitatif* (Bali: CV. Noah Aletheia, 2019), 71



Analizing adalah proses penguraian beberapa kalimat sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini analisis menjadi bagian terakhir. Adapun dalam penelitian ini kedua putusan tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah dianalisis berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama.

Kegiatan analisis data merupakan hal yang paling vital dalam sebuah penelitian.<sup>16</sup> Hasil yang diperoleh dalam menganalisis data adalah jawaban dari rumusan masalah yang dicari.

<sup>16</sup> Jamaluddin Ahmad, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 173





Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penting bagi penulis untuk membagi pembahasan ini ke dalam 5 (lima) bab agar penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

Bab Pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu penerapan *dwangsom* di lingkungan peradilan dan konsep perlingungan anak. Bab ini berisi tentang dua pokok pembahasan yang terdiri dari, Pertama, *dwangsom* di lingkungan peradilan meliputi pengertian *dwangsom*, landasan yuridis ketentuan *dwangsom*, tata cara permohonan *dwangsom*, dan putusan pengadilan yang dapat dijatuhi *dwangsom*. Kedua, konsep Perlindungan Anak meliputi pengertian perlindungan anak, perlindungan anak menurut hukum positif dan perlindungan anak menurut hukum Islam.

Bab ketiga, yaitu penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah pada Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg. Bab ini berisi tentang

Argumentasi gugatan, pertimbangan dan dasar hukum serta amar putusan pada Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Bab keempat, yaitu analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah. Bab ini berisi dua pembahasan yaitu analisis pertimbangan hukum dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

## 1. Pengertian *Dwangsom*

P. A. Stein menyatakan bahwa *dwangsom* (uang paksa) adalah penyerahan sejumlah uang kepada Penggugat berdasarkan putusan pengadilan sepanjang atau sewaktu-waktu Penggugat tidak melaksanakan hukuman. *Dwangsom* dapat diterapkan dalam pembayaran sejumlah uang sekaligus maupun setiap waktu melakukan pelanggaran.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagan, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Jakarta: KENCANA, 2017), 231

<sup>19</sup> Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 18

Fungsi utama dari *dwangsom* adalah sebagai alat/sarana eksekusi.<sup>21</sup> Kehadiran *Dwangsom* ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan *psychis* kepada Tergugat dalam rangka ia tidak mampu memenuhi hukuman pokok yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sekalipun tidak jauh berbeda dengan fungsi sandera (*gijzeling*) namun pengimplementasiannya berbeda.

Saat ini *dwangsom* bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem peradilan. Perkembangan praktik peradilan khususnya pada perkara perdata saat ini tuntutan *dwangsom* kerap kali ditemui pada surat gugatan. Dalam artian *dwangsom* bukanlah suatu yang asing dan sangat wajar apabila dimintakan oleh Penggugat.

Dalam praktik peradilan telah banyak diperiksa dan diputus beberapa permohonan *dwangsom* baik pada putusan *Yudex Facti* dan

<sup>21</sup> Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadanah", *Jurnal Nurani*, Vol.18, No.2, (Desember 2018), 239

Pada dasarnya *dwangsom* tidak dapat disamakan dengan ganti rugi atau konpensasi, karena *dwangsom* menghendaki bahwa kewajiban yang telah diperintahkan oleh hakim tidak hilang atau tidak dapat diganti sebagaimana berlaku pada ganti rugi. Namun, kewajiban akan terus berjalan bersamaan dengan dipenuhinya isi putusan tersebut.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa sifat terkait keberadaan *dwangsom* dalam sebuah putusan:<sup>23</sup>

*Accessoir* adalah perjanjian tambahan yang berlaku dan absah sesuai dengan perjanjian pokok.<sup>24</sup> Kaitannya dengan *dwangsom*, bahwa sifat dari *dwangsom* sendiri adalah mengikuti perjanjian pokok artinya apabila perjanjian pokok tidak ada, maka

<sup>24</sup> Visvandoro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 7



Keberadaan *Dwangsom* diharapkan sebagai sanksi yang bekerja dari samping, hal ini guna menekan pihak yang kalah dalam persidangan untuk melaksanakan isi putusan. Karena sifat dari *dwangsom* sendiri memberikan tekanan secara psikis sehingga pihak tersebut akan merasa terbebani dan menjadi tekanan ketika tidak menjalankan isi putusan. Dapat dikatakan bahwa *dwangsom* ini bersifat *pressie middle*, upaya paksa secara psikologis yang tergolong ke dalam eksekusi secara tidak langsung.

Ketentuan penerapan *dwangsom* apabila ditinj

- a. *Dwangsom* dalam Reglement Acara Perdata (*Reglement van de Burgerlijke Rechtsvordering*)

- Berdasarkan historis, *dwangsom* pertama kal.



Dalam praktik penerapan *dwangsom* sering kali mengakibatkan ketidakpastian dalam pengimplementasiannya hal ini menimbulkan kesan seolah-olah tidak adanya kepastian hukum (*rechtszekerheids*). Kondisi yang demikian akhirnya pemerintah Belanda kemudian mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyitaan barang-barang bergerak yang dikuasai pihak ketiga, sandera/*gijseling* dan uang paksa/*dwangsom* pada tanggal 11 April 1932.<sup>25</sup> Secara garis besar pemerintah Belanda memisahkan antara *dwangsom* sebagai alat eksekusi dan ganti rugi yang selama ini diterapkan di Prancis. Hal ini mengakibatkan adanya penyimpangan terhadap yurisprudensi Prancis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT.Alumni, 2012), 74

[illegible]



Sejak dihapuskannya Rv di Indonesia, telah terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan *dwangsom* karena HIR dan RBg yang berlaku saat ini tidak mengakomodir tentang keberadaan *dwangsom* dalam hukum acara perdata. Hal inilah yang menjadi ketidakjelasan terhadap penerapan *dwangsom*.

Hal ini dipertegas pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/SIP/1967 pada tanggal 7 Mei 1967 dalam perkara Frederika Melanie Hiverdink von Ginke melawan Leon Johannes. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim salah satunya menyatakan bahwa: “Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dan pada



Berdasarkan pasal tersebut maka hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum yakni HIR/Rbg.<sup>32</sup> Dapat disimpulkan bahwa segala jenis perkara yang tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengikuti ketentuan HIR/RBg sedangkan apabila telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut maka HIR/RBg juga tidak berlaku di Peradilan Agama. Pengaturan mengenai *dwangsom* tidak diatur sebagaimana aturan tersebut sehingga dibenarkan apabila menggunakan HIR/RBg dengan berlandaskan Pasal 54 tersebut.

Selain HIR dan RBg, peraturan lain seperti Hukum Perdata (BW) dan hukum acara yang bersumber dari Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) atau yang berlaku di Peradilan Umum secara *mutatis-mutandis* juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

- c. *Dwangsom* dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Kajian mengenai *dwangsom* saat ini telah banyak dilakukan

<sup>31</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

<sup>32</sup> Domiri, "Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 47, No. 3 (Mei 2016), 331-33

Di bidang hadanah, *dwangsom* menjadi kajian tersendiri bagi hakim. Hal ini terbukti ada beberapa diskusi yang dilakukan dalam mempertimbangkan penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah. Salah satunya diskusi yang dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI di Manado tanggal 31 Oktober 2012.

“Pada dasarnya putusan perkara hadanah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom*”.

<sup>33</sup> Mahkamah Agung RI, *Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (komisi II)* (Rakernas MA RI di Manado tanggal 31 Oktober 2012), 2





“Penetapan hak hadanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex-officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadanah dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”.<sup>36</sup>

Kedua rumusan hasil diskusi dari tahun 2012 hingga 2018 memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Rumusan tersebut dijadikan pedoman dalam penanganan perkara yang masuk baik pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Uraian di atas menunjukkan sekalipun *dwangsom* tidak termuat secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama, namun keberadaan beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas telah menjadi landasan yuridis bagi

[illegible]



Dalam hal ini, hakim Peradilan Agama seyogianya tidak perlu ragu untuk menerapkan *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama terutama pada perkara yang menyangkut persoalan hadanah hal ini semata-mata sebagai upaya untuk melindungi hak anak serta meminimalisir terjadinya putusan yang *illusoir* (hampa).

Melalui Bab XII Titel Acara Khusus Bagian Kelima Belas Pasal 291 tentang Uang Paksa disebutkan bahwa:

- [illegible]



Dibeberapa putusan tampaknya hakim mengabaikan hal yang demikian. Sebagai contoh pada Putusan PA Pasuruan Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA.Pas dan Putusan PA Pelaihari Nomor: 343/Pdt.G.2020/PA.Plh hakim menjatuhkan putusan *dwangsom* tanpa diminta oleh pihak yang berperkara dalam petitum.

Beberapa contoh putusan tersebut hakim berdasarkan hak *ex-officio* yang dimilikinya terbukti mengeluarkan putusan yang tidak diminta oleh pihak yang berperkara. Jika merujuk pada peraturan yang berlaku sebenarnya hakim tidak boleh memutus perkara yang menimbulkan *ultra petita*.

Sifat *dwangsom* merupakan *accessoir*, keberadaannya harus selalu mengikuti tuntutan pokok. Praktik peradilan menghendaki bahwa setiap permohonan *dwangsom* muncul karena adanya tuntutan pokok yang diajukan dalam petitum.

Hal ini mengisyaratkan bahwa apabila hanya terdapat tuntutan *dwangsom* saja dalam sebuah petitum maka hakim harus menyatakan permohonan tersebut ditolak.

Ketentuan Pasal 606 Rv, mengisyaratkan bahwa *dwangsom* dalam putusan hakim hanya dapat dikabulkan ketika hukuman pokoknya bukan membayar sejumlah uang. Sehingga apabila hukuman pokoknya berupa pembayaran uang maka *dwangsom* tidak dikabulkan dalam amar putusan.

Semisal dalam sebuah perkara hadanah, Penggugat dalam petitum gugatannya meminta Pengadilan untuk menetapkan anak berada dalam kekuasaan Penggugat dan meminta Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan apabila hakim menyetujui dua gugatan tersebut maka hakim tidak boleh menjatuhkan amar putusan yang juga mengabulkan permohonan *dwangsom*. Hal ini akan berbeda

[illegible]

semisal hakim hanya mengabulkan tuntutan penetapan anak tanpa pemeliharaan maka hakim boleh mengabulkan permohonan *dwangsom*.

Dalam memeriksa tuntutan *dwangsom*, Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Alasan hukum penjatuhan *dwangsom*.
- 2) Kebolehan tuntutan *dwangsom* tersebut.
- 3) Kondisional Tergugat bagaimana, apakah memungkinkan secara ekonomis melaksanakan tuntutan *dwangsom* itu.

Terpenuhi atau tidaknya beberapa hal di atas menjadi unsur bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah suatu permohonan *dwangsom* tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.

d. Terhukum Tidak Dalam Keadaan Pailit

Ketidakbolehan menjatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) terhadap pihak yang dinyatakan pailit<sup>41</sup> antara lain dapat dipahami dari ketentuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa: “Selama kepailitan Debitur tidak dikenakan uang paksa”<sup>42</sup>

Hal tersebut tentunya berlaku di lingkungan Peradilan Umum, namun tidak menutup kemungkinan dapat diberlakukan di

<sup>40</sup> Ibid, 461

<sup>41</sup> Keadaan dimana tidak mampu lagi membayar utang atau karena bangkrut {pernyataan pailit harus diputuskan oleh hakim karena untuk menjamin kepentingan bersama para kreditornya). Dikutip dari M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 130

<sup>42</sup> Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom)...*, 97



Putusan *condemnatoir* pada dasarnya adalah putusan yang berupa perintah misalnya perintah untuk membayar uang, melakukan perbuatan tertentu, menyerahkan barang dan sebagainya.

Sebagaimana di uraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa penerapan *dwangom* tidak boleh dijatuhkan ketika hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 244PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008:<sup>45</sup>

Ketiga kriteria atau syarat di atas merupakan syarat kumulatif dalam penerapan *dwangsom*. Dalam hal ini unsur tersebut menjadi syarat yang

<sup>45</sup> Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia....*, 26



## 1. Pengertian Perlindungan Anak

Dari pengertian di atas terkandung makna bahwa anak merupakan seseorang yang haknya juga terjamin akan pemenuhannya. Tidak boleh seorangpun yang berhak menyakiti bahkan merenggut dari hak anak tersebut. Sehingga dalam hal ini penting kiranya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.

<sup>47</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 92



Pada dasarnya perlindungan anak memiliki beberapa prinsip yang mana prinsip tersebut berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:<sup>48</sup>

Nondiskriminasi artinya anak berhak untuk mendapatkan segala haknya yang dijamin oleh negara tanpa adanya perbedaan terhadap apapun. Pengertian ini menegaskan bahwa tidak seorang anakpun dapat dibedakan berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, dan sukunya.

Kepentingan yang terbaik bagi anak artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak maka yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. Dalam hal ini negara harus menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan

[illegible]

Negara dalam hal ini juga harus memastikan tersedianya fasilitas-fasilitas khusus serta instansi yang memiliki tanggung jawab secara utuh terhadap perlindungan anak.

Hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan artinya bahwa hak hidup yang melekat pada setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip keadaan yang tidak dapat dibagi dalam HAM.<sup>50</sup>

Penghargaan terhadap hak anak artinya bahwa setiap anak tidak dapat dibelenggu atas kebebasan berpendapat yang dimilikinya. Dalam hal ini negara memberikan jaminan yang luas bagi kebebasan berpendapat seorang anak.

Selain itu, prinsip ini menghendaki bahwa seorang anak harus didengar dalam proses peradilan. Tujuan dari adanya prinsip ini bahwa negara menjamin setiap hak yang dimiliki anak.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap

<sup>50</sup> Ibid., 19



orang dewasa melainkan juga anak-anak. Hal ini sebagaimana Pasal

6:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa seorang anak tidak dikebiri dengan pilihan agamanya sesuai dengan kepercayaan yang dimilikinya.

b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran

Sebagai penerus bangsa, keberadaan anak menjadi penting maka dari itu pendidikan serta pengajaran yang baik merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Hal ini sebagaimana Pasal 9 ayat (1):

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Pendidikan dan pengajaran bagi seorang anak harus dijadikan hal yang utama pula bagi negara, karena kualitas seorang anak salah satunya juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang ada.

c. Perlindungan dari kekerasan seksual

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual tidak hanya menyerang mereka yang tergolong usia dewasa melainkan bagi mereka yang tergolong anak-anak, maka dari itu peran pemerintah harus hadir untuk meminimalisir banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Hal ini sebagaimana Pasal 9 ayat (1):

d. Pengasuhan oleh orang tua

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- [illegible]







c. Hak penyusuan

Tiap-tiap Ibu yang memiliki seorang anak, sejak anak tersebut lahir dibebankan kewajiban untuk menyusui anak-anaknya sejak ia kecil. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Q.S al-Baqarah (2): 233:

وَأَلَوْا إِلَدَتْ يُرْضِعَنَّ أَوْلَا دَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَا مَلَيْنِ لِمَنْ أَرَا دَ أَنْ يَيْمَ  
الرِّضَا عَةً ۖ وَعَلَى الْمُؤَلَّدِ لَهُ رَرْفُهُنَّ وَكِسَوْتُهُنَّ بِا لَمَعْرُوفِ ۖ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَا لَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَا دَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِا لَمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>55</sup>

d. Hak mendapat pendidikan

Pendidikan dan pengajaran adalah kewajiban bagi tiap orang tua. Sejak kecil anak akan terbiasa meniru setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga penting

<sup>55</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 37



memberikan dan mendidik anak dengan baik agar anak dapat membedakan mana yang seharusnya dilakukan maupun sebaliknya.

Islampun memerintahkan kepada tiap-tiap orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Hal ini sebagaimana Q.S al-Tahrim (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابُ  
رُءُوسُهُمْ عَلَيْهَا أَلَمَنَّاكُمْ عَلَيْهِمُ غَلَائِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".<sup>56</sup>

e. Hak mendapat nafkah

Jumhur ulama telah sepakat bahwa hukum hadanah, merawat dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak.<sup>57</sup>

Memberikan nafkah kepada anak tidak terbatas kepada kebersamaan orang tua, artinya sekalipun kedua orang tua telah berpisah kewajiban memberikan nafkah tetap ada.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta PT. Insan Media, 2012), 560

<sup>57</sup> Ramadan Fawzi, "Hak Hadanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam, *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2018, 98

### BAB III

Pada hakikatnya, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara perdata dalam tingkat banding adalah kewenangan memeriksa ulang kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama diteliti dan diperiksa ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Berkaitan dengan isi dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pada dasarnya tidak berbeda dengan putusan-putusan lain yang mana

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua* (Depok: Kencana, 2017), 358

### A. Argumentasi Gugatan

Begitupula pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memutus perkara Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding tentang duduk perkara yang dapat diurai sebagai berikut:

Terbanding yang berumur 20 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta dan berkediaman di Kabupaten Wajo yang diwakili oleh kuasanya bernama Nurdin Andi Mude, S.H dan Bakri

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Menetapkan, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadanah/pengasuhan terhadap Anak yang berumur 2 tahun sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya.
- c. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan Andi Armalia Atifa Al-Zena ( umur 2 tahun ) kepada Penggugat dalam keadaan aman.
- d. Menolak selain dan selebihnya.
- e. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ).

[illegible]

Pada tanggal 5 Juli 2015, Pembanding telah mengajukan memori banding yang menjelaskan sebagai berikut:

Secara *judex facti in casu* hakim Pengadilan Agama Sengkang dianggap telah keliru atau salah dalam menilai fakta pada halaman 16 yang mana hakim menilai bahwa bukti P2 yang diajukan Penggugat adalah putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menunjukkan bahwa sikap Tergugat adalah emosional padahal hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan. Pun terhadap keterangan saksi dari Penggugat sama sekali tidak menyatakan bahwa sikap Tergugat adalah emosional dan gampang marah serta memukul orang tanpa alasan.

Pembanding menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tidak dapat dipandang sebagai saksi karena pengetahuan kedua orang saksi tersebut diperoleh dari cerita orang lain.

Namun sejak Terbanding memberitahukan kuasa hukumnya pada tanggal 19 Juli 2015, belum ada kontra memori banding sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 20 Agustus 2015. Pembanding melakukan *Inzage* sebagaimana diuraikan Surat Keterangan yang dibuat Panitera PA Sengkang tanggal 3 Agustus 2015.

## B. Pertimbangan dan Dasar hukum

Terhadap perkara yang diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentunya hakim dalam memutus suatu perkara

hendaknya menimbang dan mencari beberapa alasan hukum. Oleh karenanya hakim haruslah dapat mengkaji beberapa argumentasi hukum dengan berlandaskan kepada beberapa fakta dalam persidangan maupun keterangan saksi-saksi sehingga memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pembanding dan Terbanding.

Pada perkara gugatan hak asuh anak tersebut hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan beberapa pertimbangan terkait dengan permohonan hadanah dan juga *dwangsom* pada gugatan sebelumnya yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Skg di mana pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Bahwa penyerahan hadanah yang diberikan kepada ibu oleh Pengadilan Agama Sengkang sudah dianggap benar karena apabila melihat beberapa saksi yang telah Penggugat hadirkan membuktikan bahwa Tergugat memang memiliki sifat yang emosional hal ini dibuktikan dengan bukti putusan Pengadilan Negeri Sengkang. Selain itu sifat Tergugat yang selalu mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan Anak menjadi bahan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Maka dalil dari Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar telah keliru dalam menilai Putusan Pengadilan Agama Sengkang terhadap keberadaan kedua saksi yang disebut *testimonium de audit* tidak beralasan hukum.









**A. Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang Membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang Penerapan *Dwangsom* dalam Perkara Hadanah**

Kewajiban menggali hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat telah diejawantahkan melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>61</sup>

Tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan hukum di tengah masyarakat sering kali mengalami perubahan, hal ini salah satunya disebabkan pengaruh

<sup>61</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 7

Dalam memutus perkara, hakim tentunya didasarkan atas pertimbangan dan dasar hukum. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keadilan substantif sebagai revolusi dan *rule breaking* (terobosan hukum) yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah pada dasarnya sebagai upaya hakim untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan bagi penegakan hukum di lingkungan peradilan. Hal ini semata-mata untuk meminimalisir banyaknya putusan pengadilan yang berakhir menjadi putusan yang *illusoir* (hampa).

Akan tetapi sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penerapan *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama masih tergolong sedikit terutama dalam perkara hadanah. Sebagaimana dalam putusan sering kali dijumpai beberapa perbedaan penafsiran Majelis Hakim.

[illegible]

Setelah diajukan banding oleh Tergugat, justru Pengadilan Tinggi Agama Makassar memiliki pertimbangan lain yang mana melalui putusan perkara Nomor:85/Pdt.G/2015/PTA.Mks mengeluarkan putusan yang pertimbangan hukumnya berbanding terbalik dengan Pengadilan Agama Sengkang. Dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang yang menolak permohonan *dwangsom*. Melalui pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan *dwangsom* Penggugat/Terbanding dinyatakan diterima sebagai upaya untuk mencegah putusan menjadi *illusoir* (hampa) karena Tergugat/Pembanding tidak bersedia menjalankan hukuman pokok secara sukarela yaitu menyerahkan anak kepada Penggugat/Terbanding sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, apabila Tergugat/Pembanding lalai dalam menjalankan hukum pokok yakni penyerahan anak kepada Penggugat/Terbanding maka akan dikenakan hukuman berupa pembayaran *dwangsom* berupa membayar uang sebesar

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila terjadi keterlambatan setelah putusan dibacakan.

Menimbang sifat *dwangsom* yang *accessoir*, maka hakim dalam mengabulkan permohonan *dwangsom* juga telah memperhatikan gugatan pokok yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang mana gugatan pokoknya berupa penyerahan Anak yang berumur 2 (dua) tahun kepada Penggugat/Terbanding. Sehingga *dwangsom* dalam putusan tersebut dimaknai sebagai hukuman tambahan yang harus ditunaikan oleh Tergugat/Pembanding.

Penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah adalah dalam rangka memberikan tekanan psikis kepada pihak yang kalah dalam hal ini Tergugat/Pembanding agar ia mau menyerahkan anak secara sukarela. Hal ini semata-mata untuk menjaga agar perlindungan terhadap anak dapat direalisasikan.

Perlindungan anak seperti halnya biaya hadanah, hak untuk mendapatkan hidup, mendapatkan nama yang baik, bebas dari kekerasan dan mendapatkan pengajaran akan terealisasi dengan menjalankan isi putusan secara sukarela. Konsep yang dibangun adalah kewajiban orang tua tidak akan putus sekalipun antara Bapak dan Ibunya terjadi perceraian. Sehingga mereka masih memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengasuh dan memelihara anak sekalipun dilakukan secara terpisah baik oleh Bapak atau Ibu.

Akan tetapi apabila terdapat putusan yang dilalaikan oleh Tergugat, hal ini tidak hanya merenggut dari kebebasan anak untuk hidup yang layak dan tentram namun juga berpengaruh terhadap kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Hal ini berarti orang tua telah lalai dan lupa akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu kehadiran *dwangsom* akan menjadikan semua orang tua memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Selain itu, keberadaan *dwangsom* sebagai upaya untuk menghindari konflik yang lebih besar. Mengapa demikian, dikarenakan ketika *dwangsom* tidak ada dalam putusan sedangkan terdapat Tergugat yang tidak mau menjalankan isi putusan maka langkah yang dilakukan yaitu dengan pengeksekusian anak yang justru akan berdampak pada psikologis anak dan juga hubungan antara suami dan istri yang bercerai semakin memburuk karena saling adu pendapat siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak. Tak jarang pula Tergugat akan menyembunyikan anak bahkan membawa kabur yang berdampak pada masalah yang lebih besar yaitu permusuhan.

Hal ini berbeda apabila *dwangsom* diterapkan, yang mana tentunya akan meminimalisir ketegangan antara suami dan istri yang memperebutkan hadanah dikarenakan semenjak putusan pengadilan dijatuhkan, *dwangsom* akan menekan psikis Tergugat sehingga ia secara suka rela akan menjalankan isi putusan dan hal ini tentunya akan menjadikan konflik antara keduanya dapat diminimalisir.

Menelaah pentingnya *dwangsom* dalam perkara hadanah Seharusnya Pengadilan Agama Sengkang mempertimbangkan sifat-sifat Tergugat yang melarang Penggugat untuk menemui Anak adalah suatu tindakan menghalangi atau merampas hak ibu untuk bertemu dengan anaknya. Sehingga bentuk menghalangi tersebut haruslah dijadikan landasan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik dan justru dikhawatirkan Tergugat enggan untuk menyerahkan anak kepada Penggugat sehingga *dwangsom* penting untuk diterapkan.

Namun perlu dipertegas bahwa permohonan *dwangsom* tidak bersifat imperatif (sebuah keharusan), akan tetapi sifatnya tidak wajib. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya permohonan *dwangsom* yang masuk ke pengadilan berhak untuk dikabulkan atau ditolak. Hal ini bergantung kepada penilaian dan ijtihad yang dimiliki oleh hakim.

Akan tetapi Hakim harus selalu berpikir ke depan sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada para pemohon, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengadilan dapat menjawab setiap persoalan yang ada di masyarakat.

Sebenarnya kendala-kendala selama ini terkait dengan perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Sengkang dan Pengadilan Agama Makassar dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai tuntutan *dwangsom*.

Sampai saat ini Rancangan Undang-Undang tersebut tidak kunjung disahkan sehingga hal inilah yang menjadikan belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai penerapan *dwangsom* dalam hukum acara perdata sehingga pemaknaan *dwangsom* dalam setiap putusan Majelis Hakim sering kali menghasilkan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu perlu untuk mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut.

**B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang Membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang Penerapan *Dwangsom* dalam Perkara Hadanah.**

[illegible]







Beberapa peraturan di atas sebenarnya menjadi aturan yang secara umum menjelaskan mengenai *dwangsom*. Akan tetapi pada perkara hadanah terdapat beberapa peraturan lain yang secara khusus mengatur mengenai penjatuhan *dwangsom* dalam sebuah putusan di lingkungan peradilan agama. Adapun beberapa peraturan tersebut meliputi:

SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai tindak lanjut dari diskusi kelompok badan peradilan Mahkamah Agung. Terdapat dua pokok penting dari rumusan tersebut, yakni:

“Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk mendorong pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang”.<sup>66</sup>

[illegible]

“Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan *condemnatoir* mencantumkan uang paksa”.<sup>67</sup>

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memenuhi unsur diperbolehkannya tuntutan *dwangsom* yaitu uang paksa diminta dalam gugatan. Hal ini terlihat dari petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin ke-5 secara tegas meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonan *dwangsom* setiap hari keterlambatan Tergugat/ {Pembanding lalai melaksanakan hukuman pokok.

Mengingat dalam perkara tersebut sifat gugatan adalah *condemnatoir* menjadi alasan kedua *dwan'gsom* dapat dijatuhkan. Hal ini dikarenakan bentuk putusan hadanah tersebut berupa penghukuman kepada Tegugat/Pembanding untuk menyerahkan anak kepada Penggugat/Terbanding.

Selain itu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama yang menyatakan:

“Penetapan hak hadanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex-officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadanah dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Huruf (b) Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

<sup>68</sup> Pasal tersebut merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 10 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama

Keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut menghendaki proses beracara haruslah sesuai dengan landasan dan mekanisme yang jelas. Karena saat ini banyak sekali putusan pengadilan yang melenceng dengan proses beracara.

Hal ini juga berlaku pada penerapan *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama. Bahwa tidak dibenarkan seorang hakim menjatuhkan *dwangsom* berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh hakim menjatuhkan *dwangsom* mengingat *dwangsom* yang sifatnya *accessoir* (tambahan) mengharuskan adanya pemeriksaan terlebih dahulu pada tuntutan pokok yang diajukan oleh Penggugat.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut merupakan salah satu contoh putusan yang benar karena Majelis Hakim dalam memutus *dwangsom* didasarkan atas permohonan *dwangsom* yang jelas dalam petitum Penggugat.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah sesuai dengan landasan formil yang berlaku sekalipun tidak tercantum dengan jelas dalam pertimbangan hakim.

Demi tegaknya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, haruslah dipandang bahwa putusan hakim merupakan sebuah mahkota dalam proses beracara, sehingga menjadi penting ijtihad hakim dalam kerangka menghadirkan putusan yang memiliki aspek kemaslahatan bagi



**BAB V**

**PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah pada Putusan PTA Makassar Nomor 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Skg, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum terhadap penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah pada Putusan PTA Makassar Nomor 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Skg yaitu sebagai upaya untuk meminimalisir putusan hadanah menjadi *illusoir* (hampa). Diterapkannya *dwangsom* dalam putusan diharapkan akan membuat Tergugat/Pembanding mengalami tekanan psikis sehingga mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Meskipun terdapat perbedaan putusan antara Pengadilan tingkat pertama dan banding, namun kedua putusan tersebut dianggap benar hal ini didasarkan atas objektivitas hakim dalam menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum mengabulkan permohonan *dwangsom* sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding dalam perkara hadanah di PTA Makassar telah sesuai dengan landasan filosofis dan landasan yuridis yaitu ketentuan Reglement Acara peradata (*Reglement op de bugerlijke*







- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fatonah, Ati Novianti. *Mengenal Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009.
- Fawzi, Ramdan. "Hak Hadanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam". *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam..* Vol. 1 No. 2, Oktober 2018.
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagan. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Machmud, Syahrul. *Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Mahkamah Agung RI. *Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (komisi II)*. Rakernas MA RI di Manado tanggal 31 Oktober 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua*. Depok: Kencana, 2017.
- Nuha, Liulin. "Dwangsom Perkara Hadanah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.PAS)". Skripsi -- IAIN, Ponorogo, 2019.
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Program Studi MPI UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Mubarok, Rif'an. "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.PAS)". Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)". *Jurnal SAP*, Vo. 2, No. 2, Desember 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT.Alumni, 2012.
- Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Huzaimah, Arne. “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan “Hadhanah”. *Jurnal Nurani*, Vol.18, No.2, Desember 2018.
- Pramukti , Angger Sigit dan Fuady Primaharya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress, 2014.
- Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Cet II*. Jakarta: Lentera Hati. 2004.
- Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Akbar Journal for Islamic Studies*. Vol.1, No, 1, Januari 2018.
- Sholihin , M. Firdaus. dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer.*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Tyas, D.C. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin, 2019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Visvandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.